

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN STAKEHOLDER PONDOK PESANTREN

Salisa Nurfadlillah^{1*}, Ardian Widiarto², Alvianita Gunawan Putri³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Semarang

Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Email: salisanurfadlillah@gmail.com

ABSTRACT

This study analyses the influence of transparency and accountability in financial management on the trust of students and guardians in Islamic boarding schools. The researcher used a quantitative approach by distributing questionnaires to respondents. The purposive sampling technique resulted in 153 respondents who met the research criteria. The researcher analysed the data using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method using SmartPLS version 4 software. The results showed that transparency has a significant positive influence on trust. Accountability also has a significant positive influence on trust. Transparency and accountability play an important role in increasing stakeholder trust in Islamic boarding school financial management. The implementation of good governance creates a strategic impact on building trust in religious educational institutions.

Keywords: Transparency; Accountability; Trust; Islamic Boarding School; Financial Management.

ABSTRAK

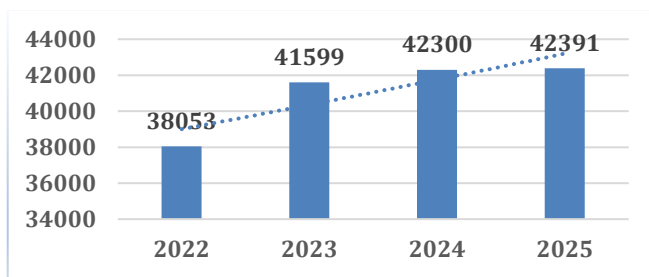
Penelitian ini menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan santri dan wali santri di pondok pesantren. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik *purposive sampling* menghasilkan 153 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Peneliti melakukan analisis data dengan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) menggunakan software SmartPLS versi 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan. Akuntabilitas juga memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan. Transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan pesantren. Penerapan tata kelola yang baik menciptakan dampak strategis terhadap pembangunan kepercayaan di lembaga pendidikan keagamaan.

Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Kepercayaan; Pondok Pesantren; Pengelolaan Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Lembaga ini mencetak generasi yang berakarakter dan berakhlak mulia. Pesantren memiliki tiga fungsi pokok menurut Windasari (2024). Pertama, pesantren menjadi pusat pengembangan pemikiran keagamaan (*Center of Excellence*). Kedua, pesantren berperan sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia. Ketiga, pesantren bertindak sebagai agen pemberdayaan masyarakat (*agent of development*).

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia



Sumber: Data EMIS Kementerian Agama

Data *Education Management Information System* (EMIS) menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pondok pesantren di Indonesia mencapai 42.391 lembaga. Jumlah ini mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Fakta tersebut membuktikan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam aspek sosial dan ekonomi (Alfani et al., 2023). Perkembangan yang pesat membuat pengelolaan pesantren semakin kompleks. Pesantren saat ini mengelola dana pendidikan, dana sosial, bantuan pemerintah, hingga unit usaha (Aripin & Nugraha, 2025). Kondisi tersebut menuntut penerapan tata kelola keuangan yang baik. Tata kelola yang baik menjaga eksistensi dan daya saing pesantren (Fitri et al., 2024).

Berbagai fenomena yang terjadi di pondok pesantren belakangan ini mendapat perhatian publik dan banyak dibahas di media massa. Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah peristiwa robohnya bangunan asrama di beberapa pesantren yang mengakibatkan korban jiwa dan luka pada santri (BBCNews, 2025). Peristiwa ini memberikan sinyal tentang pentingnya aspek keselamatan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan dana yang perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Implikasinya, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana pembangunan diduga menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kegagalan infrastruktur di pondok (WartaKotaLive.com, 2025).

Selain itu, kontroversi tayangan media seperti program *Xpose Uncensored* yang dinilai menyinggung kehidupan pesantren juga memicu respons luas dari masyarakat, khususnya kalangan alumni dan organisasi keagamaan. Tayangan tersebut dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai

pesantren dan berpotensi merusak citra lembaga pendidikan keagamaan di mata publik (NUOnline, 2025; Tempo, 2025). Hal ini juga memberikan sinyal bahwa reputasi pesantren merupakan aspek yang sensitif dan perlu dijaga, karena berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat.

Fenomena lain yang turut menjadi sorotan adalah polemik iuran dalam rangka kegiatan Hari Santri Nasional (HSN) yang dinilai tidak transparan. Kondisinya adalah ketika dana diminta untuk ditransfer ke rekening pribadi. Kasus ini telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak terkait legalitas dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Pada akhirnya, pihak terkait memberikan klarifikasi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan (Andalan.co, 2025).

Adanya fenomena sebagaimana telah diuraikan di atas memberikan sinyal bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pesantren tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif. Namun, transparansi dan akuntabilitas juga memiliki implikasi yang luas terhadap keselamatan, reputasi lembaga, serta kepercayaan para pemangku kepentingan. Untuk itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik perlu menjadi perhatian bagi entitas pondok pesantren. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan legitimasi pesantren di tengah meningkatnya perhatian publik (Siregar et al., 2024).

Sebagai lembaga keagamaan, pondok pesantren membutuhkan tata kelola organisasi yang . Ini dilakukan agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari tata kelola tersebut adalah praktik pengelolaan keuangan yang baik. Contohnya adalah pengelolaan iuran santri, sumbangan masyarakat, serta bantuan pemerintah. Selain itu, pengelolaan usaha pondok pesantren juga perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ini penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengampu pesantren (Windasari, 2024).

Kepercayaan santri dan wali santri memiliki posisi penting di pondok pesantren. Santri menjadi pemangku kepentingan yang menentukan keberlanjutan lembaga. Kepercayaan memengaruhi loyalitas santri terhadap pesantren. Wali santri memercayai pesantren yang mengelola dana secara profesional. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Galingging (2023), Sormin, (2024), dan Turi & Muharram (2023) menunjukkan pengaruh positif transparansi terhadap kepercayaan. Sebaliknya, hasil penelitian Nugraha et al. (2025) dan Sofyani & Tahar (2021) mendapati bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan. Inkonsistensi hasil ini mendorong pengujian ulang dalam konteks pesantren.

Mayoritas penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan lebih banyak dilakukan pada lembaga zakat, koperasi, organisasi publik, dan pemerintahan. Sedangkan, penelitian tentang peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan santri dan wali santri sebagai pemangku kepentingan di pondok pesantren masih terbatas. Banyak pesantren masih dikelola secara tradisional, dengan sistem keuangan yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi, sehingga proses

pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan sering kali belum sesuai dengan standar akuntansi organisasi nirlaba. Terbatasnya publikasi laporan kepada santri dan wali santri dapat berimplikasi pada penurunan tingkat kepercayaan terhadap pondok pesantren. Hal ini selaras dengan prinsip *Good Governance* yang menjelaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas pondok pesantren sebagai fondasi keberlanjutan lembaga (Nirmayani et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan pemangku kepentingan di pondok pesantren.

2. LANDASAN TEORI

2.1. STEWARDSHIP THEORY

Stewardship theory menjelaskan bahwa terdapat pandangan filosofis mengenai hakikat manusia, yang menganggap bahwa individu pada dasarnya dapat dipercaya, memiliki rasa tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam berhubungan dengan pihak lain. Hal ini tercermin dalam hubungan fidusia atau kepercayaan yang diharapkan pemegang saham terhadap manajemen. Teori *Stewardship* mengasumsikan bahwa manajemen merupakan pihak yang memiliki komitmen untuk bertindak secara jujur dan bertanggung jawab demi kepentingan publik serta seluruh pemangku kepentingan. Manajer dalam teori ini tidak berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan lebih berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama dan berupaya memaksimalkan kinerja organisasi demi kemajuan bersama (Sudarmanto et al., 2021). Oleh karena itu, *steward* diharapkan mampu mengelola sumber daya secara optimal serta menunjukkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori tersebut, pondok pesantren merupakan pengelola yang bertindak sebagai *steward* yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan lembaga. Sedangkan santri dan wali santri berperan sebagai pemangku kepentingan yang menerima manfaat dari layanan yang diberikan. Meskipun bukan merupakan *principal* dalam arti kepemilikan formal, santri dan wali santri tetap memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas pengelolaan lembaga, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh pengelola pesantren merupakan bentuk pelayanan kepada pemangku kepentingan. Ini tercermin melalui keterbukaan informasi, kejelasan pertanggungjawaban, serta pengelolaan dana yang profesional. Keberhasilan pengelola dalam menjalankan amanah tersebut akan menghasilkan kepuasan pemangku kepentingan yang pada akhirnya mendorong terbentuknya kepercayaan. Kepercayaan santri dan wali santri dibangun atas dasar nilai religius dan kualitas pelayanan yang diberikan. Ini selaras dengan teori *stewardship* yang menjelaskan pentingnya hubungan yang harmonis antara pengelola dan

para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa teori ini menganggap bahwa integritas, tanggung jawab, dan komitmen pengelola dalam memberikan pelayanan yang baik mendorong meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, teori ini dijadikan acuan untuk menjelaskan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan dalam konteks pondok pesantren (Zanra, 2024).

2.2. TRANSPARANSI

Transparansi merupakan keterbukaan informasi, data, proses, dan aktivitas yang dapat diakses oleh semua pihak, termasuk pemilik dana, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Perusahaan atau lembaga yang menerapkan prinsip transparansi akan mematuhi aturan dan pedoman yang berlaku, sehingga dapat mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Keterbukaan ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan membangun kepercayaan di antara semua pihak terkait. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam *Good Corporate Governance* (Sudarmanto et al., 2021).

Dalam pengelolaan lembaga pendidikan, transparansi mencakup kesediaan pihak pengelola untuk mengungkapkan informasi keuangan. Ini dilakukan secara akurat, jujur, dan tepat waktu. Ini dilakukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Transparansi terdiri dari keterbukaan laporan keuangan dan komunikasi antara pengelola dan para pemangku kepentingan. Contohnya, santri dan wali santri dapat memahami alur penggunaan dan pemanfaatan dana yang dikelola oleh lembaga tersebut. Transparansi keuangan dapat membantu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dengan menjelaskan bagaimana dana iuran, infak, dan sumbangan dikelola serta dialokasikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, fasilitas, dan kebutuhan santri (Balqis et al., 2022). Sebagai indikator transparansi, menurut Mardiasmo (2018), ada tiga: informatif (*informativeness*), keterbukaan (*openness*), dan pengungkapan (*disclosure*).

2.3. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja individu atau unit organisasi dalam mencapai tujuan. Konsep ini berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja serta evaluasi terhadap keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi utama organisasi. Akuntabilitas juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat guna mengatasi kendala dan meningkatkan kinerja organisasi di masa depan. Dengan demikian, akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban yang transparan dan bertanggung jawab atas semua aktivitas demi tercapainya visi dan misi organisasi (Sudarmanto et al., 2021).

Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelola. Ini dapat dilakukan dengan memperbaiki perencanaan, mengelola sumber daya, dan meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat. Akuntabilitas lembaga

dilakukan melalui pelaksanaan tata kelola dana, program kerja, dan kebijakan. Selanjutnya, akuntabilitas juga berperan dalam mengungkap potensi penyalahgunaan wewenang dan mengatasi kecurangan oleh pengurus yayasan. Dengan demikian, akuntabilitas diterapkan untuk menjaga kepercayaan publik (Pertiwi et al., 2024).

2.4. KEPERCAYAAN

Kepercayaan diartikan sebagai kesediaan individu untuk menempatkan dirinya dalam kondisi bergantung pada pihak lain, dengan asumsi bahwa pihak tersebut akan bertindak sesuai dengan hal-hal yang dianggap bernilai bagi dirinya, meskipun tidak memiliki kemampuan untuk memantau maupun mengendalikan tindakan pihak tersebut. Kepercayaan ini merujuk pada hubungan dengan pihak lain yang dapat diidentifikasi dan dipersepsikan sebagai pihak yang bertindak serta merespons secara sadar terhadap pihak yang memberikan kepercayaan (Mayer et al., 1995). Terdapat tiga faktor yang memengaruhi seseorang dalam menaruh kepercayaan kepada pihak lain, yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*).

2.5. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Transparansi pengelolaan keuangan berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengurangi asimetri informasi antara pengelola pesantren dan para pemangku kepentingan, baik santri maupun wali santri. Selanjutnya, keterbukaan informasi mengenai sumber dana, alokasi, serta realisasi penggunaan dana memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana amanah tersebut dikelola oleh pengelola pesantren. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa pengelola bertindak jujur dan profesional, sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan diperhatikan.

Menurut Turi & Muharram (2023), transparansi dalam penyajian laporan keuangan dapat memengaruhi dan memperkuat kepercayaan anggota koperasi. Ini menunjukkan bahwa semakin terbuka dan jujur suatu lembaga dalam menyampaikan informasi keuangannya, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang diberikan oleh para anggotanya. Ini juga selaras dengan Sandy & Sumaryanto (2023) yang mendapati bahwa semua program dan penyaluran yang dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan diketahui oleh pihak lain akan meningkatkan kepercayaan. Selain meningkatkan kepercayaan, transparansi juga membantu mencegah kesalahpahaman serta meningkatkan akuntabilitas manajemen pesantren (Isa'di et al., 2025).

H₁: Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan santri dan wali santri

Selain transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan elemen kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan pesantren. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan pengelola dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan

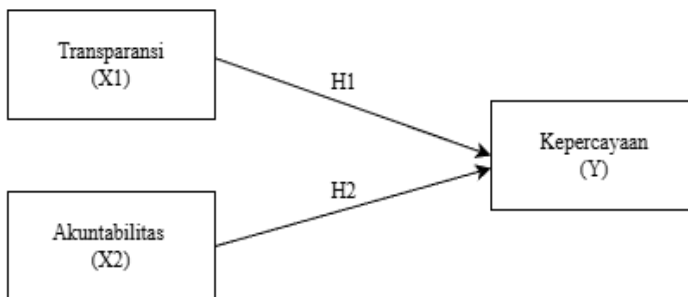
dana secara jelas, sistematis, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam lembaga pendidikan keagamaan, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat.

Akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme legitimasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pesantren harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Praktik akuntabilitas menjadi semakin penting untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan profesionalisme, regulasi, dan pengawasan publik terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Ketika santri dan wali santri menilai bahwa pengelolaan keuangan pesantren dilakukan secara akuntabel, kepercayaan terhadap lembaga tersebut akan semakin kuat dan berkelanjutan.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abarang et al. (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini berarti akuntabilitas merupakan kunci untuk menjamin bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Febriyanti & Devi (2022) bahwa baik-buruknya suatu hasil pekerjaan ditentukan oleh kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya. Sebagai bentuk akuntabilitas yang baik, setiap bagian dalam organisasi memiliki tanggung jawab atas tugas masing-masing, seperti penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan program, dan lain-lain (Soliha et al., 2024).

H₂: Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan santri dan wali santri

Gambar 2. Kerangka Peneliti



3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada santri dan wali santri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri dan wali santri Pondok Pesantren dengan jumlah populasi sebanyak 218 responden. Penentuan jumlah sampel dilakukan

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*error*) sebesar 5%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 141 responden. Rumus Slovin adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (*error tolerance*)

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria responden yang merupakan santri aktif dan wali santri yang telah tergabung dalam pondok pesantren selama kurang waktu lebih dari 1 tahun. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden memiliki informasi dan pengalaman yang relevan dengan tujuan penelitian. Responden dalam penelitian ini terdiri dari santri aktif dan wali santri karena keduanya merupakan pemangku kepentingan utama yang secara langsung terlibat dalam aktivitas dan pembiayaan operasional pondok pesantren pada tahun penelitian. Santri sebagai pengguna layanan pendidikan serta wali santri sebagai pihak yang memberikan kontribusi finansial memiliki interaksi yang intens dalam pengelolaan keuangan lembaga, sehingga dianggap memiliki persepsi yang lebih relevan.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai variabel independen, serta kepercayaan santri dan wali santri sebagai variabel dependen. Masing-masing variabel diukur menggunakan beberapa indikator yang disusun berdasarkan definisi operasional masing-masing variabel. Variabel transparansi diukur melalui informatifitas (*informativeness*), keterbukaan (*openness*), dan pengungkapan (*disclosure*). Variabel akuntabilitas diukur melalui indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Sementara itu, variabel kepercayaan diukur melalui indikator kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

Tabel 1. Variabel Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Kode	Pertanyaan
Transparansi (X1)	Informatif	T1	Informasi keuangan pondok pesantren disampaikan secara terbuka kepada santri dan wali santri.
	Informatif	T2	Informasi keuangan dapat diakses oleh santri dan wali santri.
	Pengungkapan	T3	Informasi keuangan yang disampaikan mudah dipahami oleh santri dan wali santri.

Variabel	Indikator	Kode	Pertanyaan
	Pengungkapan	T4	Setiap transaksi keuangan pesantren memiliki bukti yang dapat diperiksa.
	Keterbukaan	T5	Keputusan penggunaan dana pesantren (misalnya renovasi atau kegiatan) diumumkan secara terbuka.
	Informatif	T6	Pengurus pesantren aktif menyampaikan perkembangan kondisi keuangan pesantren.
	Keterbukaan	T7	Informasi keuangan diungkapkan secara menyeluruh kepada pihak yang berkepentingan
	Keterbukaan	T8	Informasi tentang keuangan pesantren hanya diketahui oleh pengurus tertentu dan tidak dibuka kepada santri maupun wali.
Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas hukum dan kejujuran	A1	Pengurus pesantren mengelola dana sesuai aturan dan menunjukkan tanggung jawab atas penggunaannya.
	Akuntabilitas Manajerial	A2	Setiap penggunaan dana pesantren selalu memiliki bukti dan laporan yang jelas
	Akuntabilitas Manajerial	A3	Pengurus pesantren menyusun laporan keuangan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.
	Akuntabilitas Program	A4	Dana pesantren digunakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
	Akuntabilitas Kebijakan	A5	Kebijakan keuangan pesantren disusun untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pendidikan dan sosial pesantren.
	Akuntabilitas Program	A6	Setiap kegiatan di pesantren memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.
	Akuntabilitas Kebijakan	A7	Kebijakan penggunaan dana disusun dengan mempertimbangkan

Variabel	Indikator	Kode	Pertanyaan
			kepentingan seluruh warga pesantren.
	Akuntabilitas hukum dan kejujuran	A8	Pengurus pesantren menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.
Kepercayaan (Y)	Kebaikan Hati	K1	Saya percaya bahwa pengurus menggunakan dana untuk kepentingan pesantren.
	Integritas	K2	Saya merasa pengurus pesantren jujur dalam mengelola keuangan.
	Kebaikan Hati	K3	Pengurus pesantren terbuka terhadap saran dari santri dan wali dalam hal pengelolaan keuangan.
	Integritas	K4	Saya yakin pengurus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan pengelolaan dana.
	Kemampuan	K5	Pengurus pesantren memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan.
	Kemampuan	K6	Saya percaya pengurus pesantren mampu menyelesaikan masalah keuangan pesantren secara bijak.
	Integritas	K7	Saya yakin pengurus pesantren selalu konsisten antara ucapan dan tindakan dalam mengelola keuangan.
	Kebaikan Hati	K8	Saya merasa pengurus pesantren lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan pesantren.

Sumber: Febriyanti & Devi (2022) dan Sofyani & Tahar (2021)

Analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan serta sesuai digunakan pada ukuran sampel yang relatif terbatas dan model penelitian yang bersifat prediktif. Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah pengujian model pengukuran (*outer model*) untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Selanjutnya, tahap kedua adalah pengujian model struktural (*inner model*) untuk mengetahui arah dan kekuatan pengaruh antarvariabel serta

menguji hipotesis penelitian. Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai koefisien jalur dan tingkat signifikansi yang dihasilkan dari analisis model struktural.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan analisis statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terhadap kepercayaan santri dan wali santri. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis.

Penelitian ini melibatkan dua kelompok utama, yaitu santri dan wali santri. Jumlah responden santri sebanyak 100 orang dan wali santri sebanyak 53 orang menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam aktivitas dan pemanfaatan layanan pondok pesantren. Komposisi ini mencerminkan keterwakilan *stakeholder* internal dan eksternal yang relevan dalam menilai tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren.

Sebagian besar responden telah terlibat dalam pondok pesantren selama lebih dari tiga tahun, yaitu sebanyak 63 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki pengalaman yang cukup dalam mengamati dan merasakan praktik transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren. Responden dengan durasi bergabung 1–2 tahun dan 2–3 tahun masing-masing berjumlah 51 dan 39 orang, yang memberikan sudut pandang tambahan dari anggota dengan tingkat pengalaman yang berbeda, sehingga memperkaya hasil penilaian terhadap kepercayaan.

Berdasarkan hasil pengujian awal, tidak semua indikator memenuhi nilai *outer loading* yang dipersyaratkan, yaitu $\geq 0,70$. Oleh karena itu, beberapa indikator yang memiliki nilai *outer loading* di bawah kriteria tersebut dieliminasi dari model penelitian. Setelah proses eliminasi, indikator yang dinyatakan valid dan digunakan dalam analisis lebih lanjut adalah T1, T2, T3, T5, T6, dan T7 untuk variabel transparansi; A1, A2, A3, A4, dan A5 untuk variabel akuntabilitas; serta K3, K4, K5, K6, dan K7 untuk variabel kepercayaan. Penghapusan indikator dilakukan untuk meningkatkan kualitas model pengukuran agar memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang ditetapkan dalam analisis PLS-SEM.

Tabel 2. Hasil Uji VIF

Kode	Nilai	Kode	Nilai	Kode	Nilai
T1	2,749	A1	1,863	K3	2,184
T2	3,161	A2	2,068	K4	2,068
T3	1,818	A3	2,151	K5	1,742
T5	2,067	A4	1,769	K6	1,921
T6	2,326	A5	1,649	K7	1,794
T7	1.593				

Sumber: Data diolah.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai VIF antara 1,593 dan 3,161, yang berada di bawah ambang batas 5. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian, sehingga indikator dinyatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konvergen

Konstruk	Kode	Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Transparansi	T1	0,769	0,876	0,906	0,785
	T2	0,815			
	T3	0,774			
	T5	0,792			
	T6	0,822			
	T7	0,736			
Akuntabilitas	A1	0,799	0,845	0,889	0,786
	A2	0,825			
	A3	0,832			
	A4	0,742			
	A5	0,725			
Kepercayaan	K3	0,826	0,858	0,898	0,799
	K4	0,795			
	K5	0,779			
	K6	0,809			
	K7	0,786			

Sumber: Data diolah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,7 serta nilai *composite reliability* yang melebihi batas minimum 0,7. Selain itu, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan Cronbach's alpha juga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu berada di atas 0,7. Temuan ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai untuk digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya (Sihombing et al., 2024).

Tabel 4. Hasil Uji Diskriminan

Konstruk	Transparansi	Akuntabilitas	Kepercayaan
Transparansi	0,785		
Akuntabilitas	0,686	0,786	
Kepercayaan	0,773	0,772	0,799

Sumber: Data diolah.

Pengujian validitas diskriminan dilakukan melalui analisis nilai cross-loading. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai korelasi tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Temuan ini

mengindikasikan bahwa masing-masing indikator mampu merepresentasikan variabelnya dengan tepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran (*outer model*), baik dari sisi validitas maupun reliabilitas instrumen dan data, telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, sehingga pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

Tabel 5. Hasil Uji R²

	<i>R-square</i>
Y (Kepercayaan)	0.707

Sumber: Data diolah.

Nilai R-square (R²) pada variabel kepercayaan sebesar 0,707 menunjukkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas mampu menjelaskan 70,7% variasi dalam kepercayaan santri dan wali santri. Sementara itu, sisanya sebesar 29,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Model Fit

	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>
SRMR	0,080	0,080

Sumber: Data diolah.

Evaluasi kesesuaian model dilakukan dengan melihat nilai *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai SRMR pada model saturated dan model estimated masing-masing sebesar 0,080. Nilai tersebut berada pada batas kriteria yang menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian yang baik dan mendekati model ideal.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Kode	Koef	<i>P-Value</i>	Kesimpulan
Transparansi -> Kepercayaan	H1	0,459	0,000	Berpengaruh
Akuntabilitas -> Kepercayaan	H2	0,457	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data diolah.

Tabel 7 menyajikan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mampu menjelaskan variasi kepercayaan santri dan wali santri secara signifikan. Seluruh hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan santri dan wali santri (H₁ diterima). Kemudian, akuntabilitas pengelolaan keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan santri dan wali santri (H₂ diterima). Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang baik

dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren mahasiswa berperan penting dalam memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.

4.1. PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP KEPERCAYAAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *stakeholder*, ditunjukkan oleh nilai p -value 0,000 dan koefisien jalur sebesar 0,459 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren, maka semakin tinggi pula kepercayaan santri dan wali santri.. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi keuangan berperan penting dalam membentuk persepsi positif santri dan wali santri terhadap pondok pesantren.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan dan penyampaian informasi keuangan yang dilakukan oleh pondok pesantren, semakin tinggi tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap lembaga tersebut. Transparansi memungkinkan kita memahami bagaimana dana dikelola dan digunakan, sehingga mengurangi ketidakpastian serta potensi kecurigaan.

Berdasarkan *stewardship theory*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola pesantren sebagai *steward* mampu menjalankan amanah. Ini dilakukan dengan baik melalui praktik keterbukaan informasi. Transparansi menjadi bentuk pelayanan yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen pengelola dalam mengelola keuangan organisasi. Dengan demikian, ketika informasi keuangan disampaikan secara terbuka, pemangku kepentingan menjadi lebih yakin bahwa pengelola bertindak demi kepentingan bersama. Pada akhirnya, ini menimbulkan kepercayaan bahwa dapat terbentuk secara natural.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Galingging (2023), Sormin (2024), Turi & Muharram (2023) yang menekankan transparansi sebagai mekanisme utama dalam membangun kepercayaan dan legitimasi organisasi nirlaba. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan para pemangku kepentingan. Pondok pesantren sebagai lembaga berbasis nilai keagamaan menempatkan transparansi sebagai aspek yang semakin penting, karena kepercayaan tidak hanya dibangun melalui nilai religius, tetapi juga melalui praktik pengelolaan keuangan yang terbuka dan profesional.

4.2. PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP KEPERCAYAAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan *stakeholder* dengan nilai p -value 0,000. Koefisien jalur sebesar 0,457 mengindikasikan bahwa penerapan akuntabilitas yang baik memberikan kontribusi yang kuat terhadap peningkatan kepercayaan santri dan wali santri. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diterima berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang jelas dan sistematis membuat para pemangku kepentingan yakin bahwa dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan lembaga. Bahkan, akuntabilitas menjadi sarana bagi pondok pesantren untuk menunjukkan tanggung jawab moral dan profesional dalam pengelolaan sumber daya keuangan.

Ditinjau dari *stewardship theory*, akuntabilitas mencerminkan komitmen pengelola sebagai *steward* dalam menjalankan amanah secara bertanggung jawab. Pengelola yang mampu menyajikan laporan keuangan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan menunjukkan integritas serta orientasi pada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pengelola bekerja secara profesional dan dapat diandalkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu Abarang et al., (2025), Galingging (2023), Palulun & Lambe (2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan elemen penting dalam tata kelola organisasi nirlaba. Temuan ini memperkuat pandangan akuntansi sektor publik yang menempatkan akuntabilitas sebagai dasar hubungan antara organisasi dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pondok pesantren, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk amanah yang secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap lembaga.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan *stakeholder* terhadap organisasi pendidikan nirlaba. Kejelasan informasi keuangan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana mampu menciptakan persepsi keterbukaan dan profesionalisme, sehingga memperkuat hubungan antara pondok pesantren, santri, dan wali santri.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain hanya melibatkan santri dan wali santri sebagai responden sehingga belum mencakup perspektif *stakeholder* lain seperti alumni dan donatur, serta terbatas pada satu objek pondok pesantren sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Selain itu, variabel penelitian hanya mencakup transparansi dan akuntabilitas, sementara faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepercayaan *stakeholder* belum diteliti. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden dan objek penelitian, serta mengembangkan variabel lain seperti kualitas pelayanan, reputasi lembaga, dan tata kelola organisasi guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

6. PERNYATAAN ETIS

Penulis menyatakan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) digunakan secara terbatas, etis, dan bertanggung jawab dalam penyusunan artikel ini. AI hanya digunakan sebagai alat bantu penyuntingan bahasa, meliputi perbaikan tata bahasa, struktur kalimat, kejelasan, dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan dalam perumusan ide penelitian, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penyusunan kesimpulan, maupun referensi. Seluruh substansi ilmiah, keakuratan informasi, analisis, interpretasi, dan tanggung jawab akademik atas artikel ini sepenuhnya berada pada penulis.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abarang, C. V., Pakaya, L., & Panigoro, N. (2025). YUME : Journal of Management Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDesa. *YUME : Journal of Management*, 8(2), 696–707.
- Alfani, D., Harmain, H., & Syahriza, R. (2023). Pengaruh Kepercayaan dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pondok Pesantren Al Husna. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 107–119. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i2.1540>
- Andalan.co. (2025). *Klarifikasi Ketua Harian FKPP Inhil Soal Pengelolaan Keuangan Panitia Hari Santri Nasional 2025*. <https://andalan.co/detail/5009/klarifikasi-ketua-harian-fkpp-inhil-soal-pengelolaan-keuangan-panitia-hari-santri-nasional-2025>
- Aripin, J., & Nugraha, M. S. (2025). Manajemen Keuangan Berkelanjutan di Pondok Pesantren: Pendekatan Kewirausahaan dan Tantangannya. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(1), 143–163. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v4i1.223>
- Balqis, T. R., Cahyana, A., & Riani, D. (2022). Pengaruh Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan Pesantren Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Pesantren di Kota Bogor). *Inovator*, 11(2), 413–421. <https://doi.org/10.32832/inovator.v11i3.8285>
- BBCNews. (2025). *Atap bangunan pesantren di Situbondo roboh, satu orang meninggal dan belasan terluka – Kenapa berulang?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c803g1z1ygdo>
- Febriyanti, P., & Devi, S. (2022). Kepercayaan Donatur Pada Lembaga Bali Children Foundation (BCF). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(2), 344–356.
- Fitri, S. A., Lubis, R., Citra, S., Rahmadani, S., Julita, W., & Silvian, Y. (2024). Pentingnya Penerapan Akuntansi Pesantren Studi Pada Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Barulak. *Jurnal Ekomaks: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 13(1),

- 339–344. <https://doi.org/10.33319/jeko.v13i1.142>
- Galingging, Y. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Public Trust (Studi pada Jemaat HKBP Cendana Nauli). *Jimat*, 14(03), 559–570. <https://repo.undiksha.ac.id/15500/>
- Isa'di, M., Abdurrahman Wijaya, Achmad Badrus Sholihin, Nurul Widyawati Islami R, Ana Pratiwi, Nadia Azalia Putri, Nur Ika Maulida, & Retna Anggita N. (2025). The Trust Paradox In Islamic Boarding Schools: Weak Accountability, Strong Transparency and Responsibility. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(10), 1120–1143. <https://doi.org/10.52152/801256>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., Schoorman, F. D., Mayer, R. C., & Davis, J. H. (1995). *Model of Trust*. 20(3), 709–734.
- Nirmayani, S., Anggun, B., & Lestari, H. (2025). *Penerapan Akuntansi Pesantren sebagai Responsibility Laporan Keuangan Usaha di Pondok Pesantren Darul Atqia*. 4(5), 7858–7863.
- Nugraha, R. C., Afifudin, & Nandiroh, U. (2025). *Peranan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Kelurahan*. 14, 1232–1243.
- NUOnline. (2025). *Tayangan Trans7 Soal Pesantren Lirboyo Tuai Kecamatan, Ini Respons Alumni hingga KPI*. <https://www.nu.or.id/nasional/tayangan-trans7-soal-pesantren-lirboyo-tuai-kecamatan-ini-respons-alumni-hingga-kpi-vJwor>
- Palulun, J., & Lambe, K. H. P. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan terhadap kepercayaan publik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Intan Jaya. *Jurnal Manajemen Ekonomi Bisnis Indonesia (J-MEBI)*, 1(2), 34–45. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/download/874/733>
- Pertiwi, H. F., Suryanti, N., & Rahmawati, E. (2024). Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Menurut Good Corporate Governance Dalam Pertanggungjawaban Organ Pada Pengelolaan Yayasan. *Binamulia Hukum*, 12(2), 381–392. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.612>
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Sandy, U. A., & Sumaryanto. (2023). Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqoh terhadap Kepercayaan Pembayar Zakat, Infaq, Shadaqoh di LAZISMU DIY. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 1059–1064. <https://doi.org/10.37034/infab.v5i3.618>
- Sihombing, P. R., Arsani, A. M., Oktaviani, M., Nugraheni, R., Wijaya, L., &

- Muhammad, I. (2024). *Aplikasi Smasrt PLS 4.0 Untuk Statisti Pemula* (I. Marzuki (ed.)). Minhaj Pustaka.
- Siregar, I., Marwazi, Halim, A., & Munte, R. S. (2024). Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Operasional Pesantren Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2021. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9058–9067.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/30906/20973/102241>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Soliha, A. I., Faridi, & Tobroni. (2024). Building Transparency and Accountability: Implementation of Good Governance in Modern Islamic Boarding Schools of Muhammadiyah Paciran. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 4(3), 1326–1339. <https://doi.org/10.52121/ijessm.v4i3.573>
- Sormin, K. S. B. (2024). Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3962–3973.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1389>
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Sukarman Purba, A., Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (A. K. & J. Simarmata (ed.); 1st ed.). Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Tempo. (2025). *Kontroversi Liputan Trans7, Menag: Pesantren Punya Tradisi Memaafkan*. <https://www.tempo.co/politik/kontroversi-liputan-trans7-menag-pesantren-punya-tradisi-memaafkan-2079707>
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). *Tingkat Kepercayaan Anggota Koperasi*. 2, 3787–3797.
- WartaKotaLive.com. (2025). *Bencana Terbesar Tahun 2025, BNPB Catat Jumlah Korban Meninggal di Ponpes Al Khoziny Capai 50 Orang. Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Bencana Terbesar Tahun 2025, BNPB Catat Jumlah Korban Meninggal di Ponpes Al Khoziny Capai 50 Or.*
<https://wartakota.tribunnews.com/news/869898/bencana-terbesar-tahun-2025-bnpb-catat-jumlah-korban-meninggal-di-ponpes-al-khoziny-capai-50-orang>
- Windsari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), h.18.
<https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/hasina/article/view/1395>

- Zahirah, S. Y., & Suhaedi, W. (2025). Optimizing financial management and reporting to increase accountability and transparency in Islamic boarding schools. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 25–44. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art2>
- Zanra, S. W. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Profesionalisme terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 40–55. <https://doi.org/10.69714/jilak.v1i2.83>